

PANCASILA DALAM SEJARAH BANGSA

Disusun untuk memenuhi tugas Makalah Kelompok
Mata kuliah : Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila

Oleh:

Ilham

M. Erlangga

Joel E. Sitohang

Nirvana Gabriel Panjaitan

Claudio Rafael Tarihoran

Toni Nasution



PROGRAM STUDI TEKNIK PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN

INSTITUT TEKNOLOGI SAWIT INDONESIA

MEDAN

TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	2
BAB II PEMBAHASAN	3
A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia	3
B. Menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia	6
C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik Pendidikan Pancasila.....	7
D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pendidikan Pancasila	9
E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia untuk Masa Depan.....	11
BAB III PENUTUP	16
A. Kesimpulan	16
B. Saran.....	16
DAFTAR PUSTAKA	17

KATA PENGANTAR

Pertama – tama kami mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “Pancasila Dalam Arus Sejarah Indonesia” ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Toni Nasution, M.Pd., pada mata kuliah Pancasila, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan juga bagi penulis.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Toni Nasution, M.Pd., selaku dosen mata kuliah Pancasila yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini.

Akhir kata semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan kami pada khususnya, kami menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih jauh dari sempurna untuk itu penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan kearah kesempurnaan. Akhir kata kami sampaikan terima kasih.

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara yang memiliki bentuk Negara kepulauan dan bentuk pemerintahan republik sehingga disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan masyarakatnya tidak asing lagi dengan pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia mengenal pancasila sebagai dasar Negara, pedoman, dan pandangan hidup, yang nilainya diangkat dari kehidupan masyarakat sendiri.

Pancasila merupakan dasar Negara, dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada Negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila pancasila itu tidak terlepas satu sama lain melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar Negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Pengertian dari kata “kesatuan bulat” dari pancasila ini ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain. Lantas perumusan pancasila juga dapat dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa yang selalu berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seperti yang telah diketahui bahwa pancasila itu juga merupakan dasar Negara Indonesia, yang berarti dasar dari hukum tertinggi di Indonesia atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan Naskah Proklamasi Indonesia.

Untuk itu sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab seharusnya masyarakat mengikuti dan mematuhi pancasila, karena seperti pemaparan di atas telah disebutkan bahwa pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau dasar Negara yang harus dipatuhi. Karena dalam sila-sila pancasila tidak memihak kepada satu orang saja melainkan keseluruhan warga Negara Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sejarah perumusan pancasila?
2. Mengapa pancasila diperlukan dalam kajian sejarah bangsa Indonesia?
3. Bagaimana cara menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik Pendidikan Pancasila
4. Bagaimana cara membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila?
5. Bagaimana cara mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia untuk Masa Depan?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia

1. Periode Pengusulan Pancasila

Awal munculnya ideologi bangsa itu bermula dengan lahirnya rasa nasionalisme kemerdekaan Indonesia. Dan adanya rasa nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia bertujuan agar bangsa Indonesia bersatu teguh menghadapi tantangan dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928 merupakan momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia.

Lalu dibuatkan BPUPKI oleh Jepang pada 29 April 1945. Tetapi dalam sidang tidak sedikitpun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang, dengan rasa nasionalisme sidang BPUPKI berlangsung bertahap dan semangat untuk melengkapai goresan sejarah hingga masa sekarang ini. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei – 1 Juni 1945 dengan jumlah anggota 60 orang, dengan struktur keanggotaan:

- 1) Ketua : Dr. Radjiman Wedyodiningrat
- 2) Ketua Muda : Raden Panji Soeroso
- 3) Ketua Muda : Ichibangase (Anggota Luar Biasa – Orang Jepang)
- 4) Anggota : 60 Orang (tidak termasuk ketua dan ketua muda)

BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakici Harada seorang panglima tentara ke-16 Jepang di Indonesia, pada tanggal 8 Mei 1945. Dalam sidang pertama 4 tokoh menyampaikan usulan isi dasar negara yaitu **Ir. Soekarno, Mr Muhammad**

Yamin, Ki Bagus Hadikusumo dan Mr Supomo. Dari berbagai usulan hanya satu yang diambil yakni usulan dari Ir. Soekarno yang berisi :

- a. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia,
- b. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan,
- c. Mufakat dan Demokrasi,
- d. Kesejahteraan Sosial,
- e. Ketuhanan yang Berkebudayaan.

Dari kelima gagasan itu diberi nama Pancasila, jika ada yang tidak menyukai angka 5 Soekarno mengusulkan angka tiga yang dinamakan Trisila terdiri atas Sosio nasionalisme, Sosio demokratis, dan ketuhanan yang maha esa. Soekarno juga mengusulkan angka satu yaitu ekasila berisi asas gotong royong. Kemudian dibentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang yakni Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, Muh Yamin, Sutarjo, AA Maramis, Otto Iskandardinata, dan Moh Hatta. Mereka bertugas untuk menampung usul-usul calon dasar negara.

2. Periode Perumusan Pancasila

Perumusan dasar negara Indonesia merdeka mulai dibicarakan pada masa persidangan pertama BPUPK (29 Mei - 1 Juni 1945). BPUPK sendiri didirikan pada 29 April 1945, menyusul pernyataan Perdana menteri Jepang, Kuniaki koiso, pada 7 September 1944, yang mengucapkan janji historisnya bahwa Indonesia pasti akan diberi kemerdekaan “pada masa depan”.¹

Pada tanggal 22 juni 1945, diadakan rapat gabungan antara panitia kecil, dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta yang berhasil merumuskan calon Hukum Dasar, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta atau Djakarta Charter” Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea Ke- Empat Piagam Jakarta Itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut.

¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 9

- 1) Ketuhan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk – pemeluknya.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Persatuan Indonesia.
- 4) Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat hadir dalam permusyawaratan perwakilan.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 6 Agustus 1945 : Kota Hiroshima dibom sekutu. Tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengeluarkan maklumat yang berisi :

1. Pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia (PPKI).
2. Panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1945.
3. Direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia di merdekakan.

Dan pada waktu itu BPUPKI dibubarkan kemudian dibentuk PPKI. Dilanjut pada tanggal 9 Agustus 1945 Kota Nagasaki dibom sekutu. Sedangkan tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu.

3.Periode Pengesahan Pancasila

Pancasila Dasar Negara dan Pembukaan UUD 1945 tidak dapat terpisahkan baik dalam proses perumusan dan pengesahan. Sejarah perumusan dan pengesahan Pancasila Dasar Negara dan Pembukaan UUD 1945 secara kronologis :

a. Tanggal 15 Agustus 1945

Ir.Soekarno, Moh Hatta, Dr. Radjiman widyodiningrat kembali ke Indonesia, setelah dari Vietnam pada tanggal 12 Agustus 1945 karena dipanggil penguasa militer Jepang di Dalat (Vietnam) untuk membahas hari kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang telah dijanjikan.

Terjadi peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok oleh para pemuda karena mereka para pemuda tanggap akan situasi politik dunia pada saat itu Mak mendesak agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan secepatnya.

b. Tanggal 16 Agustus 1945

Teks kemerdekaan didektekan oleh Moh Hatta dan ditulis oleh Ir. Soekarno,

lalu hasil akhir diketik oleh Sayuti Melik.

c. Tanggal 17 Agustus 1945

Dicetuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Soekarno

d. Tanggal 18 Agustus 1945

Diadakan sidang PPKI, putusan-putusan yang dihasilkan sebagai berikut :

- 1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara (UUD 1945), yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula.
- 2) Memilih presiden dan wakil presiden yang pertama.
- 3) Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan, komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kasman Singodimedjo.

Selain itu momen pancasila resmi disahkan oleh PPKI dengan berbagai perubahan.

B. Menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia

1. Pancasila sebagai Identitas Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai kepribadian bangsa harus mampu mendorong bangsa Indonesia secara keseluruhan agar tetap berjalan dalam koridornya yang bukan berarti menentang arus globalisasi, akan tetapi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan peluang yang tercipta.

2. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia

Yang artinya nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas. Dan Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri, demikian pula halnya dengan ideologi bangsa

3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia

Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebajikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia

yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata (Bakry, 1994: 158). Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak.

4. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia

Perumusan Pancasila tidak muncul dari sekedar pikiran logis-rasional, tetapi digali dari akar budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Dalam hal ini Bung Karno hanya mengaku diri sebagai penggali Pancasila, nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila itu diambil dari nilai-nilai yang sejak lama hadir dalam masyarakat Nusantara. Oleh karena itulah Pancasila disebut mengandung nilai-nilai dasar filsafat (*philosophische grondslag*), merupakan jiwa bangsa (*volksgeist*) atau jati diri bangsa (*innerself of nation*), dan menjadi cara hidup (*way of life*) bangsa Indonesia yang sesungguhnya.

5. Pancasila sebagai perjanjian luhur

Perjanjian luhur, artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara (*political consensus*) sebagai dasar negara Indonesia (Bakry, 1994: 161). Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat.

C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pendidikan Pancasila

1. Sumber Historis Pancasila

Perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI. Pada sidang ini masalah tersebut adalah tentang suatu rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Dan dibentuklah Pancasila yang di peringati sebagai hari lahir Pancasila yakni pada tanggal 1 Juni 1945. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia melaksanakan proklamasi kemerdekaan. kemudian esoknya tanggal 18 Agustus

1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang berisi lima prinsip dasar negara yang di beri nama Pancasila.

Namun Pancasila juga di gunakan sebagai filsafat atau (kebijaksanaan hidup) agar memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh. Karena Pancasila memiliki objek tersendiri yang sangat luas maka dalam ilmu psikologi mempelajari tingkah laku kehidupan manusia, tapi dalam ilmu filsafat tidak terbatas pada salah satu bidang kehidupan saja, melainkan memberi pandangan hidup pada hasil pemikiran yang tersusun dalam sistematis.

2. Sumber Sosiologis Pancasila

Sosiologi di pahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Tersusun dalam pola kehidupan sosial dari berbagai golongan kelompok masyarakat, dan juga dapat mengkaji masalah sosial. Dalam prespektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan Tempat memiliki nilai tertentu agar dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, dan termasuk perubahan sosial.

Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan sosiologi Pancasila ini sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa.

Sejak pertama kali didirikan telah menetapkan Pancasila di posisi yang luhur dan mulia namun bukan berarti menuhkannya. Dan sejak lahirnya Pancasila, dari naskah kuno zaman majapahit memuat istilah Pancasila yang berarti lima prinsip dasar. Naskah tersebut di tulis sekitar abad 14.

Peran manusia sebagai makhluk individu dan petan manusia sebagai makhluk sosial, juga sebagai pemenuhan hak sipil, politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Pandangan tersebut berlandaskan pada pemikiran Bierensde Haan Soeprapto.

3. Sumber Politis Pancasila

Pancasila sebagai politis sebagai sumber pengayaan pendidikan berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Bertujuan agar mampu mendiagnosa saran tentang mewujudkan kehidupan politik yang sesuai nilai-nilai Pancasila. Dalam tatanan tertentu mengandung nilai-nilai kaidah yang mewujudkan tata tertib sosial politik. Secara spesifik, focus kajian melalkui pendekatan politik tersebut, yakni menemukan niali ideal menjadi pedopan dalam konsep pokok politik yang meliputi kekuasaan, pengambilan keputusan,kebijakan,dan pembagian sumber daya negara.

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pendidikan Pancasila

Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno; sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR No. II/1978 tentang pemasyarakatan P-4. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik (Orpol) dan organisasi masyarakat (Ormas). Bahkan pada masa reformasi masih mengalami pasang surut yakni,enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang pancasila, bahkan berujung pada hilangnya pancasila dikurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pendidikan pancasila di perguruan tinggi.

1. Tantangan terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara

Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal.

Adapun **faktor eksternal** meliputi hal-hal berikut:

- a) Pertarungan ideologi antara negara-negara super power antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara super power.
- b) Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi.
- c) Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan ideologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara matif.
- d) Dampak konkritnya adalah kerusakan lingkungan, seperti banjir, kebakaran hutan.

Adapun **faktor internal** meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan.
- 2) Penyalahgunaan kekuasaan (korupsi) mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurut drastis.
- 3) Penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 914/E/T/2011, tertanggal 30 Juni 2011, ditentukan bahwa perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan Pancasila minimal 2 (dua) SKS atau dilaksanakan bersama mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan nama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) dengan bobot minimal 3 (tiga) SKS. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang pendidikan tinggi, memuat penegasan

tentang pentingnya dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pasal-pasal berikut.

- a) Pasal 2, menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b) Pasal 35 ayat (3) menegaskan ketentuan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang pendidikan Tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi:

1. Pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila
2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia
3. Pancasila sebagai dasar negara

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia untuk Masa Depan

1. Essensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa.

Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara (*Philosophische Grondslag*) karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Alasan filosofis berdirinya suatu negara

Alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi

suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila.
2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (*Weltanschauung*) mengandung unsur nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat.

2. Urgensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa

A. Hasil Survei yang dilakukan KOMPAS yang dirilis pada 1 Juni 2008:

1. 48, 4% responden berusia 17 sampai 29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap.
2. 42, 7% salah menyebut sila-sila Pancasila.
3. 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila.

B. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut:

1. Pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain.
2. Penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu.
3. Melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Faktor penyebab rendahnya pemahaman dan pengamalan tentang nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia dewasa ini:

1. Banyak generasi muda yang menerapkan budaya barat
2. Kurangnya pengajaran karakter bangsa berlandaskan Pancasila
3. Adanya sikap apatisisme
4. Adanya kesenjangan sosial.

CONTOH KASUS

Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia, memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila.

1. Masalah Kesadaran Perpajakan Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa, karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. APBN 2016, sebesar 74,6 % penerimaan negara berasal dari pajak. Masalah yang muncul adalah masih banyak Wajib Pajak Perorangan maupun badan (lembaga/instansi/perusahaan/dan lain-lain) yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan yang disampaikan masih belum sesuai dengan harta dan penghasilan yang sebenarnya dimiliki, bahkan banyak kekayaannya yang disembunyikan. Masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, tidak membayar pajak tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.
2. Masalah Korupsi Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. Transparency Internasional (TI) merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan data dari TI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling korup di dunia. pendidikan Pancasila perlu diintensifkan di perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa merupakan kelompok elit intelektual generasi muda calon-calon pejabat publik di kemudian hari.
3. Masalah Disintegrasi Bangsa Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Disamping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan Negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif, antara lain terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai contoh acapkali mengemuka dalam wacana publik bahwa ada segelintir elit politik di daerah yang memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi daerah. Mereka

terkadang memahami otonomi daerah sebagai bentuk keleluasaan pemerintah daerah untuk membentuk kerajaan-kerajaan kecil. Implikasinya mereka menghendaki daerahnya diistimewakan dengan berbagai alasan.

4. Masalah Penegakan Hukum yang Berkeadilan Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Memang banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, tetapi faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Konkretnya penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparaturnya. Inilah salah satu urgensi mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa.
5. Masalah Terorisme Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Asal mula dari kelompok terorisme itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia. Namun, faktanya terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Mengapa mereka mudah terpengaruh paham ekstrim tersebut? Sejumlah tokoh berasumsi bahwa lahirnya terorisme disebabkan oleh himpitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman keagamaan yang kurang komprehensif terkadang membuat mereka mudah dipengaruhi oleh keyakinan ekstrim tersebut.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pancasila merupakan dasar Negara, dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada Negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila pancasila itu tidak terlepas satu sama lain melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar Negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Pengertian dari kata “kesatuan bulat” dari pancasila ini ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain.

Sila-sila pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamis, dengan gerakan-gerakannya yang positif dan serasi, karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara. Karena tata negara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahannya. Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa bangsa dan negara, sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa tampak menonjol satu atau beberapa sila saja. Dari kalimat diatas telah diketahui bahwa pancasila sangat berperan untuk keutuhan negara. Dengan kelima sila tersebut kehidupan masyarakat akan lebih terarah.

B. Saran

Demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai materi yang menjadi bahasan dalam makalah ini, tentunya banyak kekurangan dan kelemahan kerana terbatasnya pengetahuan kurangnya rujukan atau referensi yang kami peroleh hubungannya dengan makalah ini. Penulis banyak berharap kepada para pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun kepada kami demi sempurnanya makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Yudi Latif, *Negara Paripurna*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015)
- Laurensius Arliman S, Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman, *Justicia Islamica*, Volume 13, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights In The Area Of Social Conflict, The 1st Ushuluddin and Islamic Thought International Conference (Usicon), Volume 1, 2017.
- Prawirohardjo, Soeroso, dkk. 1987. Pancasila sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu. Yogyakarta: Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat.
- Ristek (Ed.). 2009, Sains dan Teknologi: Berbagi Ide untuk Menjawab Tantangan dan Kebutuhan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- kompasiana. 2020. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pendidikan Pancasila. Diakses pada 4 september 2021.
- Maria Farida. 2007. Ilmu perundang-undangan proses dan teknik pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius